



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

Venti Eka Satya
Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Pembentukan Komite MRPN tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2023. Komite MRPN bertanggung jawab langsung kepada Presiden Jokowi, diketuai oleh Suharso Manoaarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Komite ini dibentuk untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian intern demi mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Selain itu, juga untuk mendorong entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan, serta memberikan keyakinan bagi entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Entitas MRPN terdiri dari kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.

Komite MRPN bertugas di antaranya menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor; menetapkan strategi pembangunan budaya risiko lintas sektor; melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan MRPN lintas sektor; melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor; menyusun profil risiko pembangunan nasional yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada presiden; melaporkan dan mengusulkan kepada presiden rencana tindak pengendalian atas risiko tersebut; serta menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor.

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Risiko Pembangunan nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional. Hal ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari karena banyaknya unsur ketidakpastian baik dari dalam maupun luar negeri, akan tetapi dapat diminimalisir. Salah satu upaya untuk meminimalisir risiko ini adalah dengan melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko sendiri memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir kejadian yang akan berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian, untuk meningkatkan kejadian yang memiliki dampak positif, dan mengurangi kejadian yang berdampak negatif terhadap pekerjaan. Tujuan tersebut akan berpengaruh pada biaya, waktu, mutu, dan ruang lingkup.

Manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik awalnya banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asian Development

Bank, IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara maju. *Good governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah. Konsep *good governance* di Indonesia mulai muncul setelah era reformasi dimulai yang dilatarbelakangi oleh masalah peninggalan pemerintah orde baru. Seperti pemerintahan yang berpusat pada presiden, lembaga tinggi negara yang tidak berjalan baik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Pembentukan komite MRPN ini merupakan suatu upaya yang patut diapresiasi karena menunjukkan itikad baik pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan menghindari risiko yang dapat menghambatnya baik dari pihak internal maupun eksternal pemerintah, dari dalam maupun luar negeri. Manajemen risiko ini juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi tindak kecurangan dari berbagai pihak yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Atensi DPR

Pembentukan Komite MRPN merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir ketidakpastian dalam pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melaksanakan hal ini, pemerintah tidak hanya mampu meminimalisir risiko ketidakpastian maupun kecurangan, akan tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari dunia internasional terutama lembaga donor. DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu terus mendorong upaya pemerintah untuk meningkat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan memperkuat pelaksanaan pengawasan pembangunan. Komite MRPN dapat menjadi perpanjangan tangan DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintah dengan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komite ini.

Sumber

bisnis.indonesia.com, 19 Juni 2023;
cnbcindonesia.com, 18 Juni 2023;
cnnindonesia.com, 18 Juni 2023; dan
tempo.co, 19 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023